POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PANTAI KAMPUNG PELANGI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DI RANDUPUTIH KECAMATAN DRINGU PROBOLINGGO

by Husni Mubaroq

Submission date: 19-Jul-2022 04:20PM (UTC+0400)
Submission ID: 1872590513
File name: ANGAN_DESA_WISATA_DI_RANDUPUTIH_KECAMATAN_DRINGU_PROBOLINGGO.pdf (223.41K)
Word count: 3338
Character count: 23062

J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1, No.9, Februari 2022

POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PANTAI KAMPUNG PELANGI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DI RANDUPUTIH KECAMATAN DRINGU PROBOLINGGO

Oleh
Husni Mubaroq[1], Murtias Puji Astutik[2]
[1,2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Panca Marga
Email: [1]husnimubaroq139@gmail.com

Article History:
Received: 12-12-2021
Revised: 05-01-2021
Accepted: 24-01-2021

Keywords:
Community, Potential, Resources, Tourism

Abstract: *Various efforts from various parties, especially the government, are trying to reduce poverty to the maximum. The tourism village program is a reference for community empowerment by developing in an area to cultivate the potential of local resources as an effort to overcome poverty in an area. This research method as outlined is a qualitative descriptive research method. The focus of this research is the government and the village community in an effort to empower the community to improve welfare in Randuputih Village, Dringu District, Probolinggo Regency. Therefore, this study will discuss the tourism village program as a manifestation of community empowerment in empowering the community in Randuputih Village. This research is important because it will analyze the form of community empowerment through Tourism Villages in Randuputih Village. This study will provide insight in the context of developing Tourism Villages so that people can take advantage of the local potential that exists in the Tourism Village.*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan menjadi suatu tugas pemerintah untuk mengupayakan adalah kemiskinan. Berbagai upaya dari berbagai pihak khususnya pemerintah berupaya agar pengentasan kemiskinan ini dapat berjalan secara maksimal. Sektor pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang mulai diupayakan untuk pengentasan kemiskinan dimana salah satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.

Pemberdayaan pada masyarakat merupakan alternatif pilihan yang tepat. Menurut Widayanti (2012) pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya kemiskinan yang menjadi *concern publik* dimana dilaksanakan di berbagai elemen dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat salah satu upaya memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yangdihadapinya.

Program desa wisata menjadi acuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara pengembangan di suatu daerah untuk mengelola potensi sumber daya lokal

sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan di suatu daerah tersebut. Dengan begitu adanya Desa Wisata masyarakat lebih diuntungkan karena banyaknya wisatawan yang masuk. Banyak manfaat dengan adanya program desa wisata untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yaitu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota dengan pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata). Hal yang diharapkan dari program desa wisata yaitu mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat kedepan.

Pengembangan desa wisata bisa menjadi pilihan dukungan dari pemerintah di Indonesia karena Nusantara ini sangat beragam terkait potensi alam maupun potensi budaya, namun tidak banyak yang termanfaatkan oleh masyarakat. Pelestarian alam ditawarkan dari adanya Desa Wisata adalah keasrian sebuah kawasan, oleh karena itu dengan perkembangan desa wisata ini akan didapat keuntungan dari segi ekonomi dengan adanya sumber pendapatan baru yang bisa jadi memberikan pendapatan dan mengubah perekonomian masyarakat. Dari segi lingkungan, akan menjadikan masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, karena mengedepankan aspek keasrian lingkungan sebagai sebuah aksi wisata yang ditawarkan.

Potensi wisata adalah segala hal dalam keadaan baik yang nyata dan tidak dapat diraba yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa dimanfaatkan, diwujudkan sebagai kemampuan faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa-jasa. Pada hakekatnya pengembangan adalah suatu proses untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang ada. Pengembangan obyek wisata merupakan kegiatan membangun, memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Fandeli (1995:24) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada: Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas dan tradisi lokal, meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata kepada penduduk lokal, berorientasi kepada pengembangan wisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif, memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Menurut Edward (1991:27), mengatakan bahwa suatu objek wisata harus mempunyai 5 unsur penting, yaitu:

1. Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanaan primer karena keinginannya untuk menyaksikan,merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikan kedalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen.
2. Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi,sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana wisata cenderung dapat mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan.

3. Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan atau pengawasan.
5. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wistawan.

Program pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dengan salah satu daerah yang telah berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat ada di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Randuputih telah dijadikan salah satu desa wisata yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Keberadaan Desa Wisata Randuputih ini telah menjadikan masyarakat Desa Randuputih mampu memberikan perubahan misalnya adanya peningkatan perekonomian masyarakat dari produksi bawang sebagai salah satu unggulan di Desa Randuputih. Masyarakat tidak hanya menjual hasil panen secara langsung namun memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk dijadikan tempat untuk wisata yaitu sehingga masyarakat mendapat pendapatan tambahan dari hal tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang program desa wisata sebagai salah satu perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam memandirikan masyarakat di Desa Randuputih. Penelitian ini menjadi penting karena akan menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata di Desa Randuputih dengan adanya kajian ini akan memberikan wawasan dalam rangka pengembangan Desa Wisata sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Wisata tersebut.

METODE

Metode yang dituangkan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan metode deskriptif diarahkan secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuraih, 2006;47). Maka berdasarkan pengertian di atas diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian–kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi serta menganalisa kebenarannya berdasarkan fakta yang ada. Fokusnya yaitu pemerintah dan masyarakat Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Pemberdayaan masyarakat upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki dan adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait (Aprillia Theresia, 2015:93). Adapun indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan
2. Keterampilan/Kemampuan
3. Program

HASIL

Pantai Kampung Pelangi sudah ramai dikunjungi oleh pengunjung wisatawan lokal. Setelah dijadikan Pantai Kampung Pelangi di lingkungan pesisir Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menjadi terlihat rapi, bersih, dan juga mengurangi kesan kumuh dan tidak hanya itu keramaian pengunjung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan baik makanan, minuman, dan snack. Perbaikan Pantai Kampung Pelangi memperhatikan hal : peningkatan perbaikan kondisi lingkungan mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, Pelibatan masyarakat secara aktif, Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pembentukan hingga pelaksanaan pada program pemerintah setempat meskipun bersifat top-down bukan berarti masyarakat hanya tinggal menerima begitu saja tetapi keberhasilan pembangunan Pantai Kampung Pelangi bukan hanya ditangan pemerintah namun juga harus mendapatkan dukungan dan melibatkan masyarakat sejak perencanaan. Sebab itu dalam hal perencanaannya telah perwakilan tokoh masyarakat.

Tiga aspek sebelum adanya pemberdayaan masyarakat di Pantai Kampung Pelangi Randuputih yaitu aspek lingkungan dimana dahulu tipe permukiman pinggiran atau kumuh, lingkup masyarakat sekitar warga sudah memiliki rasa menjunjung kebersamaan, hidup rukun, gotong royong dengan sesama warga, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, terakhir jenis pekerjaan yang masyarakat sebagian petani dan nelayan. Masyarakat Randuputih merupakan tipe yang suka bila ada sesuatu yang baru masuk mereka masih kaku terhadap upaya dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan masih sedikit yang ikut berpartisipasi.

Potensi pengembangan wisata ini dapat menjadikan suatu destinasi wisata menjadi viral terutamadimediasosialyaituberupaspot foto sekarang ini yang perlu dikembangkan dalam wisata. Keunikan Pantai Kampung Pelangi yang viral melalui sosial media dan juga media lainnya terlihat adanya spot foto di beberapa titik dapat membuat wisatawan yang berjalan memutari Pantai Kampung Pelangi tidak bosan, spot foto dihias agar lebih berwarna dengan aksesoris yang menarik. Pengunjung atau wisatawan yang datang dapat membeli souvenir berupa gantungan kunci yang dimaksudkan sebagai tanda masuk wisata dan souvenir berupa gantungan kunci ini dapat diperoleh di setiap gang-gang yang berada dikawasan Kampung Pelangi.

Salah satu upaya pengembangan dari masyarakat melalui Festival Lomba Menghias di Pantai Kampung Pelangi awalnya dilakukan untuk memperingati HUT Republik Indonesia tahun 2021 namun, selain itu tujuan utamanya adalah sebagai upaya promosi mengangkat potensi wisata di Pantai Kampung Pelangi. Selain menikmati wisata swafoto, pengunjung atau wisatawan juga dapat mencari kuliner makanan yang dijual penduduk setempat. Ada pula yang membuka angkringan yang dicat warna-warni semarak dengan berbagai karakter seperti lingkungan di sekitarnya.

Proses yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh desa Pantai Kampung Pelangi yaitu pemberdayaan pembentukan perilaku sadar atau penyadaran. Dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi para tokoh desa melalui rapat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembentukan Pantai Kampung pelangi di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini pendampingan dilakukan berupa kemampuan dan keterampilan, memberikan bantuan berupa bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada ibu- ibu PKK untuk menggali kemampuan yang mereka

miliki, serta dinas Koperasi dan UMKM.

Upaya mengembangkan merupakan salah satu pemberdayaan dalam masyarakat desa dengan diwujudkan berdasar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Adapun pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan sebagai proses perwujudan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling berkaitan yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pengetahuan bagian terpenting dalam upaya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir dimana pengetahuan dijadikan kekayaan intelektual masyarakat dan harus dipertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan dalam konteks pengembangan lingkungan masyarakat pesisir. Hal terpenting juga kemampuan menjadi implikasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di desa Randuputih Dringu Probolinggo serta harus beriringan dengan pengetahuan yang memadai di mana diperlukan pendekatan ilmu yang bersifat konseptual yang setidaknya tidak bersifat tradisional lagi.

Terakhir, keterampilan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat suatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Pada dasarnya keterampilan memang perlu dan akan lebih baik terus diasah dan dilatih untuk menaikan kemampuan-kemampuan sehingga menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan yang ada. Masyarakat pesisir pada umumnya tidak terlepas dari keadaan geografis yakni tinggal di wilayah perairan sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dimana dalam proses pengembangan keterampilan menggunakan teknik-teknik turun-temurun yang mereka dapat dari nenek moyang mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subjek pembangunan yang ada dan apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Strategi Formulasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Probolinggo

Proses perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, pengidentifikasian peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif dan pemilihan strategi pada lembaga tersebut. Begitu juga dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi konseptor sekaligus eksekutor kebijakan di bidang pengembangan pariwisata di Kabupaten Probolinggo. perumusan strategi pengembangan pariwisata dimulai dari pembuatan rencana induk berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut dapat berupa *Master Plan, DED (Detail Engineering Design)*, serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Sebagai pengembangan dari visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terutama misi kelima yaitu melakukan pengenalan dan *expose* potensi obyek dan daya tarik wisata, dan potensi pendukung lainnya termasuk budaya, kreativitas pemuda dan

wisata olah raga serta misi keenam yaitu melakukan optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kerakyatan, ada beberapa prioritas yang harus didahulukan, tetapi tidak mengecualikan daya tarik pariwisata yang lainnya.

Pihak pemerintah daerah memang belum mengembangkan dan mengelola beberapa daya tarik wisata di daerah Probolinggo karena harus mendahulukan objek pariwisata yang menjadi prioritas. Mengenai peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Peluang
   1) Sistem pengembangan pariwisata yang tidak kenal waktu, batas, dan wilayah.
   2) Daya tarik wisata yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang tidak ada putusnya.
   3) Daya tarik wisata yang dikembangkan dapat memicu tercapainya kesejahteraan masyarakat.
b. Ancaman
   1) Polusi, khususnya polusi udara yang timbul dari kendaraan bermotor wisatawan.
   2) Budaya lokal yang dapat bergeser akibat interaksi masyarakat lokal dengan para wisatawan.
c. Kekuatan
   1) Potensi daya tarik wisata/ objek pariwisata.
   2) Masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata.
   3) Pemerintah yang sangat peduli dalam bidang kepariwisataan.
d. Kelemahan
   1) Sumber Daya Manusia internal pariwisata dan pengelola pariwisata yang masih belum memenuhi beberapa kualifikasi, misalnya tingkat pendidikan, golongan atau pangkat, serta keterampilan yang didapat dari kursus.
   2) Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, misalnya akses jalan menuju objek pariwisata.
   3) Terbatasnya dana.

Strategi alternatif yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Probolinggo berdasarkan wawancara tersebut adalah mengoptimalkan strategi pemasaran dengan cara gencar melakukan promosi melalui berbagai media, yaitu melalui internet, *leaflet, booklet*, VCD dengan *icon "Pacitan is Paradise of Java"* yang diberikan kepada tamu-tamu negara dan berfungsi sebagai *souvenir*, serta mengikuti pameran pariwisata baik di tingkat regional maupun tingkat nasional untuk lebih mengenalkan keindahan pariwisata di Kabupaten Probolinggo kepada khalayak umum.Pemilihan strategi yang diambil pemerintah dalam mengembangkan objek pariwisata pantai adalah dengan membuat daftar prioritas pengembangan pariwisata pantai.

Strategi Implementasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Probolinggo

Penerapan strategi (strategi implementasi) pengembangan objek pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan mengharuskan pemerintah melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan kontrol. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dengan sistem pembagian hasil retribusi pariwisata pantai, koordinasi dengan masyarakat sekitar pantai, serta melakukan kontrol terhadap pengembangan pariwisata pantai di tingkat desa. Kontrol yang dilakukan bukan hanya tentang pencapaian target yang harus dicapai untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memantau tentang sejauh mana pengembangan aksesibilitas pariwisata, serta kunjungan rutin kepada Pemerintah Desa. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga juga melakukan pengembangan wilayah pesisir sebagai objek pariwisata pantai bersama tiga pilar *good governance*, yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di Pantai Kampung Pelangi.

Strategi Evaluasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Probolinggo

Ada dua evaluasi dalam pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Pertama adalah tentang kerjasama antara tiga pilar *good governance* di Pantai Kampung Pelangi yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak yang menjadi evaluasi pemerintah daerah adalah dampak negatif, di mana timbul konflik antara masyarakat dan swasta yang berujung pada pemutusan kontrak kerja dengan pihak pengelola swasta. Setelah pemutusan kontrak kerja tersebut, keadaan pantai menjadi tidak terawat. Beberapa wahana permainan tidak beroperasi, TIM SAR yang tidak selalu datang karena tidak ada pengawasan, dan sebagainya. Bahkan tarif retribusi yang berlaku hanyalah tarif parkir. Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi dengan segera melakukan tindakan kuratif yaitu melakukan proses pelelangan dengan perbaikan prosedur dalam *open recruitment* pengelola pantai seperti yang dikehendaki oleh masyarakat.

Evaluasi yang kedua adalah tentang pengelolaan pantai lain yang belum optimal. Pemerintah belum mengelola daerah pesisir tertentu karena menggunakan skala prioritas pengembangan daerah pariwisata, sedangkan pihak swasta memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu luas wilayah pesisir pantai minimal seluas 5 hektar, pantai dekat dengan sumber air bersih dan tersedia listrik, serta masyarakat sekitar mendukung kerjasama dengan pihak swasta.

KESIMPULAN

Pengembangan desa wisata bisa menjadi pilihan dukungan dari pemerintah di Indonesia karena Nusantara ini sangat beragam terkait potensi alam maupun potensi budaya, namun tidak banyak yang termanfaatkan oleh masyarakat. Pelestarian alam ditawarkan dari adanya Desa Wisata adalah keasrian sebuah kawasan, oleh karena itu dengan perkembangan desa wisata ini akan didapat keuntungan dari segi ekonomi dengan adanya sumber pendapatan baru yang bisa jadi memberikan pendapatan dan mengubah perekonomian masyarakat. Upaya mengembangkan merupakan salah satu pemberdayaan dalam masyarakat desa dengan diwujudkan berdasar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan pemerintah melalui pengembangan wisata Pantai Kampung Pelangi seharusnya memberikan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih paham tentang suatu informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan

masyarakat, perlu adanya pelatihan yang lebih digiatkan. Hal ini sangatlah berpengaruh untuk pengembangan masyarakat guna mengetahui sejauh apa perkembangan wisata Pantai Kampung Pelangi. Mengoptimalkan potensi yang bisa dikembangkan dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan harus melibatkan masyarakat agar tahu potensi-potensi apa yang perlu digali. Peningkatkan masyarakat seperti kesadaran cara berpikir untuk terlibat dalam sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari beberapa stakeholder, baik itu masyarakat, pihak swasta ataupun lembaga masyarakat. Banyaknya stakeholder yang terlibat seharusnya tidak membuat pemerintah daerah melakukan pengelolaan secara otoriter. Meskipun sebagai stakeholder yang mempunyai otoritas terhadap pengelolan kawasan pesisir, dalam pelaksanaan pengelolaannya melibatkat berbagai stakeholder yang terkait. Agar pengelolaan pariwisata pesisir dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan setidaknya ada dua opsi pengelolaan yang ditawarkan, yaitu : pertama, Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dengan stakeholder dan kedua, Badan Layanan Usaha Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah dan stakeholder.

DAFTAR REFERENSI

[1] Abdur Rohim, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY)", skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 20

[2] Amrulloh, Zaenudin. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Pada Dusun tradisional sasak Sade LombokNTB,2014.

[3] Arikunto, Suharsimi (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.Hlm 136.

[4] Dumasari.2014.Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 17-18

[5] Hanifa Fitrianti, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Talun Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat" dalam jurnal Economics Development Analysis Journal, VOL.3,No.1,(2014),hlm.210-211.

[6] Maisaroh, (2011) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Pintar Pijoengan Di Dusun Daraman, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

[7] Oka A Yoeti. (1992). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Ofset Angkasa. Hal-12

[8] R.Randy, Wrihatnolo. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Elex Komputindo.

[9] Soetomo, (2014). Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

[10] Sumardjo.(1999). Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

[11] Totok Mardikanto, Poerwowo Soeboto, (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

[12] Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PANTAI KAMPUNG PELANGI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DI RANDUPUTIH KECAMATAN DRINGU PROBOLINGGO

ORIGINALITY REPORT

23%	21%	15%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ desanusawungu.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		